

## INFORMALITAS DALAM FORMALITAS PADA RUANG TERBUKA PUBLIK (Studi Kasus Lapangan Gasibu, Bandung)

RR Dhan Damajani

Program Studi Arsitektur, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan,  
Institut Teknologi Bandung, Indonesia  
Email: ddamajani@yahoo.com

### ABSTRAK

Lapangan Gasibu saat ini memiliki peran yang sangat penting bagi Kota Bandung. Pada awalnya, ruang terbuka ini dirancang sebagai ruang publik formal sebagai bagian dari Kompleks Gedung Sate. Dalam sepuluh tahun terakhir, ruang terbuka publik ini menduduki tempat teratas dalam hal jumlah maupun keragaman aktivitasnya. Beragam kegiatan ekonomi, sosial, politik, budaya termasuk keagamaan diselenggarakan di area ini baik harian, mingguan, maupun bulanan. Salah satu kegiatan yang menarik adalah pasar minggu yang mungkin merupakan pasar minggu terbesar di Indonesia. Pasar yang terjadi secara spontan ini adalah sebuah fenomena urban vernakular yang terjadi pula di bagian lain di Kota Bandung. Saat ini, wacana informalitas dalam formalitas ruang publik menjadi isu penting yang harus ditempatkan pada posisi yang tepat.

**Kata kunci:** informalitas-formalitas; lapangan gasibu; urban-vernakular

### ABSTRACT

*Gasibu square plays an important role for the Bandung City. At the beginning, this open space was formally designed as part of government complex buildings (Kompleks Gedung Sate). For last ten years, this public space has achieved its ultimate position in its diversity and participants. Various activities such as economic, social, political, cultural and religion held there which are daily, weekly, monthly, and yearly. One of the most interesting activities is The Sunday Market which is probably the biggest Sunday market in Indonesia. This spontaneous market activity is a phenomena of urban vernacular which happened at the other part of the city of Bandung. Discourse in informality and formality of public space become an important issues which has to be treated carefully.*

**Keywords:** informality-formality; Gasibu Square; urban-vernacular.

### PENDAHULUAN

Wacana urbanitas saat ini menjadi salah satu persoalan yang sangat penting baik dalam konteks Indonesia maupun global. Pada tingkatan dunia, dalam 25 tahun (1980-2004), jumlah penduduk urban dunia telah meningkat dua kali lipat; dari sekitar 1,5 milyar menjadi lebih dari 3 milyar (Santoso, 2006). Keadaan ini di satu sisi merupakan situasi strategis; menyelesaikan persoalan-persoalan kota berarti menyelesaikan separuh persoalan bumi, namun di pihak lain, kegagalan dalam memahami situasi dan persoalan kota berarti separuh dari bumi di ambang kehancuran.

Dalam situasi dunia yang sudah sedemikian kompleks saat ini, untuk memahami sebuah kota, kita tidak dapat lagi sekedar melihat artefak-artefaknya, melainkan harus pula didekati melalui diskursus sosial dan humanisme. Dalam konteks ini, kota dipahami sebagai sebuah konstruksi sosial, yang dibentuk untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-

hari serta berfokus pada persoalan bagaimana warga kota memperjuangkan hidupnya. Hal ini seringkali bertentangan dengan apa yang dihasilkan oleh perencanaan yang bersifat formal. Yang berdasarkan pada prinsip-prinsip yang abstrak, yang bersifat kuantitatif, formal, spasial, atau perseptual.

Dalam konteks tersebut, ruang publik urban menjadi aspek yang sangat menentukan karena kehidupan keseharian dan kehidupan sosial terjadi di ruang publik. Dalam pengertian yang paling umum, ruang publik dapat berupa taman, tempat bermain, jalan, atau ruang terbuka. Ruang publik kemudian didefinisikan sebagai ruang atau lahan umum, dimana masyarakat dapat melakukan kegiatan publik fungsional maupun kegiatan sampingan lainnya yang dapat mengikat suatu komunitas, baik melalui kegiatan sehari-hari atau kegiatan berkala.

Dalam pengertian yang lebih luas, bila dikaitkan dengan kehidupan keseharian warga kota, pengertian ruang publik juga termasuk angkutan umum, halte, jalan, trotoar dan jalur aksesibilitas lainnya, pasar,

halaman bangunan umum seperti: sekolah, rumah sakit, perkantoran yang melayani kepentingan publik. Ruang publik diharapkan dapat menjadi wadah interaksi sosial budaya warga kota dan bukan sekedar sebagai pelengkap bagi tujuan-tujuan ekonomi dalam arti sempit. Ruang publik sejati adalah yang merupakan *public domain*, yang menjamin penguasaan bersama oleh khalayak, terbuka untuk interaksi dengan orang asing secara damai, aman, dan majemuk (plural). Selanjutnya, ruang publik seharusnya dapat memberi kesempatan bagi, dan sekaligus menuntut, pemuncakan kapasitas sosial manusia yang kemudian menjadi dasar pencapaian dalam segala bidang peradaban (Kusumawijaya, 2006: 98).



Sumber: <http://earth.google.com>

**Gambar.1** Foto udara kondisi di sekitar lapangan Gasibu dan boulevard MPRJB

Lapangan Gasibu sebagai kasus studi dalam penelitian ini merupakan salah satu ruang publik yang saat ini menempati posisi teratas dalam hal jumlah maupun keragaman aktivitasnya di Kota Bandung. Ruang urban ini berada di sebelah Utara Kompleks Gedung Sate, salah satu gedung yang menjadi simbol ibu kota parahyangan ini. Pada awalnya, ruang terbuka tersebut bernama *Wilhelmina Plein* lalu berubah menjadi Lapangan Diponegoro sekira tahun 1950-an. Pada tahun 1960-an, tempat ini sempat menjadi tempat permukiman liar (Katam, 2005: 251). Nama Gasibu adalah kependekan dari Gabungan Sepakbola Indonesia Bandung Utara (Gasibu) karena ruang terbuka ini pernah menjadi tempat berlatih beberapa klub sepakbola masyarakat yang berada di daerah Bandung Utara. Nama tersebut bertahan hingga sekarang walaupun aktivitas yang diwadahnya sudah sangat beragam, termasuk di antaranya kegiatan *pasar kaget* yang diadakan setiap hari Minggu. Sejak tahun 1980-an, lapangan ini kerap menjadi tempat favorit untuk berolah raga, khususnya pada sore hari. Namun, tidak ada catatan pasti, kapan pasar ini mencapai bentuknya seperti sekarang ini. Kegiatan yang selalu didatangi oleh ribuan orang ini mungkin merupakan *pasar minggu* (*sunday market*) terbesar di Indonesia.

#### FORMALITAS PADA PERANCANGAN AWAL LAPANGAN GASIBU

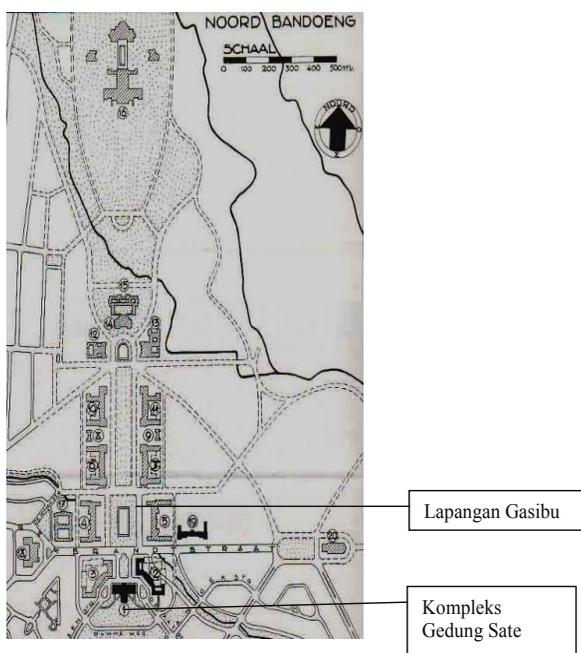
Keberadaan Lapangan Gasibu dan sekitarnya tidak dapat terlepas dari sejarah perencanaan Kompleks Gedung Sate yang berada pada sisi Selatannya. Kedua ruang terbuka yang saling berkait ini pada awalnya dirancang oleh Tim Perancangan Ibu Kota Nusantara yang dipimpin oleh Genie V.L. Slors untuk pembangunan Gedung Instansi Pemerintah Pusat di Bandung. Perancangan kompleks gedung tersebut merupakan bagian dari usaha pemindahan Ibu Kota Pemerintahan Hindia Belanda dari Batavia ke Kota Bandung.

Kompleks ini ditata saling berhadap-hadapan dan di tengah-tengahnya terdapat taman yang memanjang, bersumbu (seolah-olah) menuju Gunung Tangkubanparahu. Alasan pemilihan rancangan Gerber tersebut karena dianggap memiliki gaya dan langgam arsitektur yang memiliki nuansa tradisional nusantara. Hasil pemilihan tersebut juga tidak terlepas dari peran serta arsitek ternama Belanda Hendrik Petrus Berlage, yang berhasil mempengaruhi pemerintah kolonial kala itu dengan saran-saran dan pendapat-pendapatnya.



Sumber: Voskuil, 1996: 145

**Gambar 3 Foto udara kompleks Gedung Sate dan sekitarnya sekira tahun 1921**



**Gambar 4. Rencana Kompleks Gedung Instansi Pemerintahan Pusat.**

Berdasarkan rencana tersebut, terlihat bahwa pada awalnya kompleks ini direncanakan akan menjadi sebuah ruang kota yang bersifat formal; yang merupakan representasi dari kekuasaan pemerintah. Namun, rencana besar untuk mengembangkan dan menata lokasi kompleks perkantoran instansi pemerintahan pusat itu akhirnya tidak dapat diteruskan karena adanya malaise pada tahun 1934. Selain itu disebabkan juga karena pada awal tahun 1930-an pihak badan sekuriti militer Hindia Belanda telah mengetahui akan rencana ekspansi Jepang ke Asia Tenggara sehingga anggaran belanja Hindia Belanda harus lebih dicurahkan untuk keperluan militer (Kunto, 1996: 111).

Keberadaan Kompleks Gedung Sate– Lapangan Gasibu hingga tahun 1980an telah menjadi salah satu tengaran di kota Bandung. Pada tahun 1985 dibangunlah Boulevard MPRJB yang terletak di sebelah utara lapangan Gasibu, memanjang pada sumbu imajiner yang menghubungkan Gedung Sate dan Tangkubanparahu. Salah satu latar belakang dibangunnya monumen ini adalah untuk melanjutkan rencana yang telah digagas sebelumnya yaitu membangun kompleks ini menjadi ruang kota dengan karakter formal untuk mendukung fungsi kompleks Gedung Sate sebagai fasilitas perkantoran pemerintah yang bersifat formal. Hingga tahun 1995an ketika diselenggarakan peresmian Monumen, lapangan Gasibu belum menunjukkan keberagaman aktivitas seperti sekarang ini. Kegiatan yang umumnya dilakukan di lokasi ini adalah olah raga dan kegiatan komunal lain seperti upacara-upacara hari besar nasional, pameran-pameran terbuka yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak lebih dari 4 kali dalam setahun, dan kegiatan keagamaan yang juga diselenggarakan oleh pemerintah seperti sholat hari Raya Idul Fitri, dan lain-lain



**Gambar 5. Formalitas Kompleks Gedung Sate– Lapangan Gasibu – MPRJB (Foto dari lantai tertinggi Gedung Sate, mengarah ke halaman kompleks Gedung Sate dan Lapangan Gasibu. Tampak Gedung**



Sumber: Simon, *Over Indonesia*, 1992: 73.

**Gambar 6. Parade militer di Lapangan Gasibu. Di sebelah kiri adalah Jl. Sentot Alibasyah. Posisi lapangan ini tidak tepat arah utara-selatan.**

### GAMBARAN UMUM AKTIVITAS DI LAPANGAN GASIBU SAAT INI

Lapangan Gasibu saat ini memegang peranan yang sangat penting bagi Kota Bandung. Fleksibilitas ruang berukuran kurang lebih 100x200 meter ini berfungsi seperti alun-alun pada kota-kota tradisional. Jalan-jalan di sekeliling dan ruang terbuka linear di sebelah utaranya semakin memperkuat dan mendukung fungsi lapangan ini sehingga dapat mewadahi kegiatan kota dalam berbagai skala.

#### Kegiatan sosial-ekonomi

Fungsi utama lapangan ini yang semula adalah sebagai area olah raga, telah menarik para pedagang untuk berjualan di sekitar Gasibu. Pada awalnya, pedagang berjualan pada jam-jam tertentu saja ketika ada pengunjung yang berolah raga. Namun dengan adanya fasilitas perkantoran di sekitar Lapangan Gasibu, jumlah dan lama aktivitas menjadi semakin meningkat. Beberapa kelompok pedagang bahkan berjualan sepanjang hari, terutama mereka yang skala ekonominya semakin meningkat. Terjadilah beberapa sudut/kelompok pedagang di sekitar lapangan, termasuk di sepanjang jalan yang mengelilinginya.

Kegiatan pasar minggu merupakan kegiatan paling unik ruang terbuka ini dan selalu dinanti oleh ribuan orang; bukan saja para penjual, melainkan juga para pembeli yang gemar berbelanja. Salah satu ilustrasi suasana tergambar pada gambar berikut. Pada waktu-waktu tertentu, seperti pada bulan puasa, jumlah aktor pun semakin meningkat. Mereka yang berjualan tidak hanya dari "kelas kaki lima", melainkan yang berdagang dengan menggunakan mobil dengan berbagai jenis (sedan, box, dll.).



**Gambar 7. Para pelaku sektor informal di sekitar trek lapangan Gasibu yang menyediakan makanan dan minuman ala adarnya bagi mereka yang selesai berolah raga**



**Gambar 8. Ilustrasi suasana pasar minggu**



**Gambar 9. "Cafe jalanan" keliling di sekitar trek lapangan Gasibu yang menyediakan makanan dan minuman bagi mereka yang berpuasa (2007)**

#### Sosial-Politik

Lapangan Gasibu juga sering digunakan untuk mewadahi kegiatan-kegiatan peringatan hari besar nasional, seperti berbagai upacara: peringatan

Bandung Lautan Api (Maret), Hari Pendidikan Nasional (Mei), Hari Kebangkitan Nasional (Mei), peringatan hari kemerdekaan (Agustus), Hari Jadi Kota Bandung (September), Kesaktian Pancasila (Oktober), dan lain-lain. Ketika "penguasa formal" memerlukan area ini, secara alamiah para aktor yang sehari-hari menghidupkan ruang ini akan "menyingkir" untuk sementara ke kantong-kantong area di sekitar lapangan, seperti sudut-sudut persimpangan, halaman kantor-kantor, dan lain-lain.



**Gambar 10.** Suasana ketika lapangan digunakan sebagai tempat upacara



Foto diambil dari lapangan Gasibu mengarah ke salah satu sudut bangunan sayap Kompleks Gedung Sate.

**Gambar 11.** Ilustrasi suasana ketika halaman Kompleks Gedung Sate dan Lapangan Gasibu dipenuhi oleh massa yang sedang berunjuk rasa.

Selain itu, ruang terbuka ini sering pula digunakan untuk mewadahi kegiatan yang bersifat politis lain, seperti demonstrasi (baca: unjuk rasa). Hal ini disebabkan oleh lokasi lapangan yang berdekatan dengan Kompleks Gedung Sate dimana lembaga perwakilan rakyat bekerja. Berbagai issue sosial, ekonomi, politik termasuk keagamaan yang melatarbelakangi munculnya unjuk rasa kerap terjadi di area ini. Pada situasi tertentu, dalam keadaan mendesak jalan-jalan di sekitarnya akan ditutup untuk sementara dan lalu-lintas akan dialihkan ke jalan lain

di sekitarnya. Selain jalan-jalan, tentu saja halaman kompleks Gedung Sate dan lapangan Gasibu akan dipenuhi para pengunjung rasa seperti terlihat pada gambar berikut. *Thirdspace* dikonstruksi oleh kumpulan massa yang "menghidupkan" ruang ini.

### Sosial-Budaya

Lapangan Gasibu sejak menjelang tahun 2000, juga diminati oleh masyarakat pebisnis, terutama yang bergerak di bidang entertainment. Hampir setiap minggu jika tidak ada acara resmi (yang diselenggarakan oleh pemerintah), ruang terbuka ini akan ramai diisi oleh berbagai kelompok seperti: grup musik dengan sponsor perusahaan rokok, atau acara musik dangdut yang diselenggarakan oleh berbagai stasiun televisi swasta, atau berbagai acara pameran yang biasanya berlanjut pada hari Minggu.



Sumber: Pikiran Rakyat, 19 Desember 2004.

**Gambar 12.** Ilustrasi suasana pertunjukan panggung musik di malam hari. Tampak di sudut kanan, cahaya lampu dari bangunan Gedung Sate.

Kegiatan pameran baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, sering pula diadakan. Beberapa yang rutin diselenggarakan antara lain: pameran produksi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) seluruh Indonesia, pameran produk unggulan Jawa Barat, pasar murah menjelang Lebaran, pameran bunga, dan lain-lain. Demikian halnya dengan festival-festival yang sering menggunakan jalan-jalan protokol termasuk di sekitar kompleks Gedung Sate; seperti dalam acara Kemilau Nusantara 2005, pawai bunga tahun 2004 dan 2006, dan lain-lain.

### Keagamaan

Lapangan Gasibu juga digunakan sebagai wadah kegiatan keagamaan yang memerlukan ruang terbuka, seperti sholat hari Raya Idul Fitri, ceramah-ceramah yang bersifat kolosal, tempat manasik haji, dan lain-lain. Keragaman kehidupan beragama yang ada di kota Bandung, meskipun sebagian besar memeluk agama Islam, juga dapat dirasakan di

beberapa sudut lain di kota ini. Area-area di sekitar tempat peribadatan, seperti Gereja, Kelenteng, pada hari-hari tertentu saat ritual keagamaan diselenggarakan juga mengalami suasana yang berbeda. *Thirdspace* terkonsruksi oleh aktivitas keagamaan oleh para aktor penghayatnya.



Foto: Andri Gumita, 2006.

**Gambar 14. Suasana Gasibu saat digunakan untuk kegiatan Sholat Idul Fitri**

#### INFORMALITAS DALAM FORMALITAS

Wacana informalitas dan formalitas merupakan dua kutub perbincangan yang hingga saat ini selalu dipertentangkan (khususnya yang terkait dengan persoalan kota). Informalitas pada umumnya merupakan sub-ordinasi dari formalitas yang dikonstruksi oleh modernisme, sehingga sering dianggap sesuatu yang menjadi "lawan" dari formalitas. Dalam beberapa kasus, informalitas digiring dalam kerangka legal aspek dan dianggap sebagai sesuatu yang illegal "contoh: pedagang kaki lima).

Berdasarkan contoh tersebut di atas dengan adanya berbagai peristiwa/even yang berlangsung, terlihat bahwa informalitas merupakan fenomena keseharian yang terjadi di lapangan Gasibu. Hal ini juga terjadi di sebagian besar ruang publik di Kota Bandung. Informalitas juga menjadi peristiwa keseharian yang banyak menopang kehidupan masyarakat kebanyakan. Di sisi lain, keberadaan sektor informal ini terbukti sangat dibutuhkan pula oleh warga kota yang tercermin dari "hidupnya" ruang-ruang yang diisi oleh sektor ini.

Aktivitas yang secara alamiah terbentuk ini diduga terdorong oleh keterbatasan lapangan pekerjaan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah/negara. Terlebih lagi setelah terjadinya krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 yang dampaknya masih terasa hingga saat ini. Sejumlah besar masyarakat yang sebelumnya bekerja di sektor formal, seperti perbankan, industri, dan profesi

lainnya, mengalami pemutusan hubungan pekerjaan dan beralih ke lapangan kerja informal.

Berbagai aktivitas yang dilakukannya tentu saja memerlukan wadah spasial dalam kota. Pada umumnya ruang yang dipilih adalah ruang terbuka publik yang dapat "diakses" melalui berbagai cara. Hal ini dilakukan secara alamiah tanpa didasari pemahaman tentang struktur dan bentuk kota. Akibatnya, melalui penelitian ini, terungkap bagaimana ruang-ruang kota Bandung yang pada awalnya dibangun sebagai ruang kota dengan tatanan formal, telah dikonstruksi menjadi ruang informal melalui peristiwa-peristiwa atau aktivitas keseharian yang dinamis dan terus berubah.

Fenomena ini memiliki sisi positif maupun negatifnya. Dari sisi positif, terungkap bahwa ruang ini memiliki arti yang sangat besar bagi sebagian warga kota dalam menopang kehidupan kesehariannya. Spontanitas yang terjadi memperlihatkan adanya kebutuhan dasar yang dapat terwadahi oleh ruang urban tersebut. Kesenambungan yang terjadi dan "hidup"nya ruang tersebut juga mencerminkan bagaimana masyarakat mengatur diri untuk berbagi ruang, berbagi waktu, dan berbagi kesempatan dalam "memanfaatkan" ruang-ruang tersebut. Dari sisi negatif, keberadaan kegiatan tersebut seringkali "mengganggu" dan mengambil "hak" publik warga kota lainnya, terutama para pejalan kaki. Karena itu, diperlukan pengaturan dan perencanaan yang dapat mengatasi persoalan-persoalan yang ditimbulkan sebagai akibat/implikasi adanya kegiatan-kegiatan tersebut. Di sinilah peran pemerintah kota yang harus segera diberdayakan dengan tepat sasaran.

Salah satu preseden yang dapat dijadikan studi banding adalah penanganan yang dilakukan terhadap para pelaku sektor informal khususnya *street-vendor* yang terdapat di Kota Bangkok. Pemerintah kota yang didorong oleh kebijakan Raja Thailand memberikan "ruang gerak" dengan membuat trotoar dengan lebar bervariasi yaitu 4, 6 bahkan 8 meter pada area-area tertentu sehingga dapat menampung pejalan kaki, kiosk, termasuk jalur *difable* dan area untuk tempat duduk. Hal ini menjadikan jalan-jalan sebagai salah satu ruang terbuka kota yang paling dominan - menjadi hidup (*vibrant*) dan membuat kota Bangkok terpilih menjadi salah satu kota terbaik dunia.

Aktivitas para pelaku sektor informal ini didukung pula oleh kalangan desainer dengan membantu membuat rancangan gerobak/perangkat jual yang ergonomis, bersih, dan tepat guna. Selain itu, diberlakukan pula beberapa aturan lain yang berfungsi mengontrol dan mengendalikan keberadaannya seperti: aturan tentang kebersihan,

area yang diijinkan dan (sebagian kecil area) yang terlarang, termasuk pengaturan waktu (saat-saat boleh berjalan). Harmoni informalitas dan formalitas menjadi tujuan akhir yang perlu terus diupayakan. Dengan memberikan "ruang gerak" yang memadai bagi keberadaan informalitas, maka keduanya akan mencari bentuknya masing-masing dalam sebuah hubungan yang diharapkan pada gilirannya akan mencapai sebuah bentuk kesetimbangan baru.



**Gambar 15.** Suasana salah satu trotoar di sekitar area pusat kota Bangkok. Lebar trotoar yang sangat memadai, memungkinkan berbagai aktivitas sosial terjadi dan "menghidupkan" kota.



**Gambar 16.** Salah satu contoh gerobak/perangkat jual hasil rancangan desainer guna mendukung kegiatan para pelaku sektor informal. Perangkat dan alat yang bersih dan terancang baik akan meningkatkan kualitas kinerja secara keseluruhan dan akan meningkatkan pendapatannya

## KESIMPULAN

Berdasarkan contoh kasus studi ini, dapat disimpulkan bahwa dengan diakuinya keberadaan para aktor yang selama ini termarjinalkan, maka akan terbentuk kerangka pikir baru dalam memahami persoalan kota. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pembentukan wacana baru dalam menyikapi berbagai persoalan di Kota Bandung. Dalam konteks perencanaan kota, diharapkan akan membuka wawasan dan pemahaman para perencana termasuk pengelola kota dalam menyikapi fenomena informalitas. Selain itu, diharapkan pula adanya kesadaran akan keterbatasan masterplan atau pun rencana-rencana kota lainnya sehingga perlu dipertimbangkan lebih lanjut "bentuk" rencana kota yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam menyelesaikan persoalan ruang kota.

Dalam konteks implementasi pembangunan kota, dengan adanya kesadaran akan kompleksitas permasalahan perkotaan, implementasi pembangunan kota tidak dapat lagi dicapai hanya dengan membuat cetak biru atau seperangkat peraturan, namun dengan mengupayakan untuk mengontrol, mengendalikan dan mempengaruhi arah serta persiapan berbagai kemungkinan solusi dalam menghadapi berbagai situasi ketidakpastian.

Dari sisi kelembagaan, diperlukan peran aktif seluruh aktor (pemerintah kota, perencana, warga di sekitar lokasi, para pelaku sektor informal, pengusaha dan stake-holder lainnya) yang terlibat dalam penciptaan lingkungan yang aman, bersih dan nyaman baik secara fisik maupun sosial. Masing-masing ditempatkan sesuai dengan peran dan fungsinya sehingga terjadi sinergi yang mampu menggerakkan seluruh potensi yang ada. Pengaturan tidak hanya dilakukan secara ruang, namun juga secara waktu. Diperlukan "tim" yang secara khusus mengatur kegiatan ini hingga detil teknis pelaksanaan, di antaranya adalah pengaturan waktu kegiatan dan pengaturan waktu bagi para pelaku sektor informal tersebut.

Dari sisi penataan fisik, beberapa kriteria yang harus dipenuhi antara lain: mengacu pada persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum dan lingkungan (termasuk persyaratan teknis bagi para *difable*), merespon kondisi setempat dengan mempertimbangkan kultur masyarakat urban di kota Bandung, mempertimbangkan aspek pemeliharaan, bersifat dinamis dan terbuka pada setiap perubahan sejauh tidak merugikan pihak-pihak tertentu

## UCAPAN TERIMA KASIH

Riset ini dibiayai oleh ITB berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian No: 0023/K01.

03.2/PL2.1.5/1/2007, tanggal 10 bulan Januari 2007, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Chase, J., Crawford, M., Kaliski, J., *Everyday Urbanism*, The Monacelli Press, Inc., New York. 1999.
- Cuthbert, Alexander R., Editor, *Designing Cities: Critical Readings in Urban Design*, Blackwell Publishers, Massachusetts. 2003.
- Kunto, Haryoto, *Wajah Bandoeng Tempo Doeloe*, PT Granesia, Bandung. 1984.
- Kusumawijaya, Marco, *Kota Rumah Kita*, Borneo Publications, Jakarta, Indonesia. 2006.
- Leach, Neil, *Rethinking Architecture: A Reader in Cultural Theory*, Routledge, London and New York. 1997.
- Lefebvre, Henri, *The Production of Space*, Blackwell Publishers Inc., Massachusetts. 1991.
- Pemerintah Kota Bandung, *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung 2013*. 2004.
- Santoso, Jo, *[Menyiasati] Kota Tanpa Warga*, Kepustakaan Populer Gramedia dan Centropolis, Jakarta. 2006.
- Shane, David Grahame, *Recombinant Urbanism: Conceptual Modelling in Architecture, Urban Design, and City Theory*, John Wiley & Sons Ltd., England. 2005.
- Simon, Richard, *Over Indonesia: Aerial Views of The Archipelago*, Archipelago Press, Singapore. 1997.
- Soja, Edward W., *Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places*, Blackwell Publishers Inc., Massachusetts. 1996.
- Tjahjati, B., *Pendidikan Perencanaan Wilayah dan Kota dalam Dasawarsa Mendatang (Orasi Ilmiah)*, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB, Bandung. 2006.
- Tschumi, Bernard, *Architecture and Disjunction*, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts. 1996.
- Voskuil, R.P.G.A., *Bandoeng: Bleed van een Stad*, Asia Maior, Purmerend. 1996.
- Voskuil, P.P.G.A. (terj.), *Bandung: Citra Sebuah Kota*, Departemen Planologi ITB bekerja sama dengan PT Jagaddhita, Bandung. 2007.